



Article Type: empirical.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Finanda Sari. YM, Agus Setiawaty*



Afiliasi:

Universitas Mulawarman

*Korespondensi:

agus.setiawaty@feb.unmul.ac.id

DOI: 10.24853/jago.5.2.203-221

SITASI:

YM., Sari, F., & Setiawaty A., (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, 5(2), 203-221

Proses Artikel:

Diterima:

28/01/2025

Revisi:

27/03/2025

Disetujui:

17/04/2025



Attribution-NonCommercial
4.0 International (CC BY-NC
4.0)

JAGo Website:



Abstract

Objectives To determine the effect of the Government Internal Control System (SPIP) and the Accessibility of Financial Reports on the Accountability of Village Financial Management.

Design/method/approach: Data in this research is quantitative using questionnaire which distributed to 91 respondents consisting of village government officials and BPD in 13 villages in Muara Badak District. This research uses Structural Equation Modeling - Partial Least Square (SEM-PLS) to analyze data.

Results/findings: SPIP has a positive effect on the accountability of village financial management while the accessibility of financial reports has no significant effect.

Theoretical contribution: This study empirically proves the importance of SPIP for accountability of village financial management. This finding contributes to the development of literature on the important role of SPIP which has so far only been known in the context of local government.

Practical contribution: The research provides important insights in increasing the effectiveness of village financial management accountability through the implementation of SPIP.

Limitations: The sample is limited to certain villages that experience problems related to financial management. In addition, the discussion of accessibility only involves the accessibility of financial reports (accountability).

Keywords: Government Internal Control System (SPIP), Accessibility of Financial Reports, Accountability of Village Financial Management.

Abstrak.

Tujuan penelitian: Untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Desain/metode/pendekatan: Data pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang didistribusikan kepada 91 responden yang melibatkan pemerintah desa dan BPD di 13 desa di Kecamatan Muara Badak. Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling- Partial Least Square (SEM-PLS)*.

Hasil penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kontribusi teori: Penelitian ini membuktikan secara empiris pentingnya SPIP bagi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai peran penting SPIP yang selama ini hanya dikenal dalam konteks pemerintah daerah.

Kontribusi praktik/kebijakan: Hasil penelitian memberikan wawasan penting dalam meningkatkan efektivitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui penerapan SPIP.

Keterbatasan: Sampel yang terbatas pada desa tertentu yang mengalami permasalahan terkait pengelolaan keuangan. Selain itu, pembahasan aksesibilitas hanya melibatkan aksesibilitas laporan keuangan (pertanggungjawaban).

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Aksesibilitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

PENDAHULUAN

Prinsip otonomi daerah merupakan prinsip yang memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat (Arifiyanto & Kurrohman, 2014). Demikian halnya desa yang diberikan kesempatan untuk mengelola secara mandiri keuangan desa yang dimilikinya, mengembangkan potensinya, melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya asas otonomi daerah, desa oleh pemerintah diberi otoritas untuk mengatur dan mengalokasikan penggunaan keuangan desa yang diberikan secara langsung untuk dipertanggungjawabkan kepada publik.

Terkait pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sehingga dalam mengelola keuangan desa pemerintah desa wajib melaksanakan dengan tertib dan berlandaskan asas transparan, partisipasi, dan akuntabel (Martini, et al., 2019). Asas akuntabilitas perlu untuk diperhatikan oleh aparatur desa sebagai pihak pengelola Dana Desa (DD) karena berkaitan dengan tanggungjawab Pemerintah Desa terhadap publik. Dengan demikian, masyarakat lebih menuntut pemerintah untuk melaksanakan prinsip tata kelola sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan terciptanya tuntutan tersebut mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menerapkan akuntabilitas publik (Artini & Putra, 2020). Di dalam pemerintah desa, akuntabilitas sangat penting karena merupakan salah satu cara pemerintah desa bertanggung jawab dan berkomitmen penuh sebagai entitas yang mengelola keuangan desa (Hasanah et al., 2020). Fenomena yang muncul dalam pengelolaan alokasi dana desa saat ini adalah penyelewangan atau penyalahgunaan.

Guna mengurus urusan desa secara mandiri desa memerlukan dana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2, dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat harus dikelola dengan benar dan tepat. Sumber pendapatan desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 1, juga diperoleh dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi APBN dalam bentuk dana desa, Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, Hibah dan sumbangan yang tidak berasal dari pihak ketiga, serta pendapatan lain-lain desa yang sah (Peraturan Pemerintah RI, 2014). Sebagaimana sumber pendapatan desa yang kedua yaitu alokasi APBN dalam bentuk dana desa, dana desa adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada desa dan ditransfer melalui RKUN ke RKUD dan kemudian ke kas desa (Peraturan Pemerintah RI, 2014).

Laporan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) memperlihatkan bahwa korupsi di level desa konsisten menjadi posisi pertama yang paling banyak ditangani oleh aparat penegak hukum terhitung sejak 2015 hingga 2022. ICW mencatat sejak pemerintah menggelontorkan dana desa pada tahun 2015, kasus korupsi di pemerintahan desa meningkat. Pada tahun 2016 jumlah kasus korupsi di desa sekitar 17 kasus dengan 22 orang tersangka. Enam tahun kemudian, jumlah kasusnya melonjak drastis sebanyak 155 kasus dengan 252 orang tersangka. Menurut ICW, faktor menjadi penyebab korupsi di sektor desa, diantaranya karena minimnya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, dan tingginya biaya politik pemilihan kepala desa.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah yang memperoleh dana desa dalam jumlah besar dan mengalami peningkatan dalam jumlah penyalurannya. Adapun kondisi data penyaluran dana desa pada Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2020-2023 (Tabel 1). Dengan terus meningkatnya angka penyaluran dana desa untuk Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan Pemerintah Desa mampu mengelola dana desa dengan baik dengan akuntabilitas yang tinggi.

Tabel 1.

Nilai Penyaluran Dana Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2023

No.	Tahun	Dana Desa (Rp)
1.	2020	187.633.528.000
2.	2021	191.170.927.000
3.	2022	176.844.267.000
4.	2023	192.420.471.000

Sumber: Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kartanegara

Faktanya, terjadi banyak kasus korupsi pada Pemerintah Desa berupa penyimpangan pengelolaan ADD dan DD dengan kerugian negara mencapai Rp1 miliar lebih pada tahun 2017-2018. Tindak korupsi juga terjadi di salah satu desa yang melibatkan mantan kepala desa dengan

menggelapkan APBDes sebesar Rp. 200.000.000. Selain itu, penyalahgunaan keuangan desa juga dilakukan dalam kegiatan semenisasi jalan (beritaalternatif, 2023). Praktik kecurangan dana desa juga diduga telah dilakukan salah satu Pj Kepala Desa di Kukar dengan memasukan dokumen dan stempel dengan nilai mencapai Rp1 miliar lebih (klikkaltim, 2023).

Dari beberapa kasus Pemerintah Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara tak sedikit yang terjerat kasus korupsi penyalahgunaan keuangan desa baik itu DD maupun ADD. Hal ini terjadi pada salah satu desa di Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara. Dugaan penyalahgunaan ini menunjukkan pelaporan dan pertanggung jawaban atas ADD yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan dan dana yang diberikan tidak dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat disebabkan karna kurang optimal nya penerapan sistem pengendalian intern, serta rincian anggaran dan informasi informasi terkait yang tidak dipublikasikan kepada masyarakat umum dapat memicu adanya indikasi dari tidak transparansinya praktik tata kelola pemerintahan. Maka perlu untuk dilakukan penelitian terkait pengelolaan dana desa pada desa desa di Kecamatan Muara Badak.

Hal ini mengindikasikan adanya malpraktik akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan tidak sesuai dengan asas transparansi, partisipasi, dan akuntabel. Perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Pengendalian dilakukan sesuai pedoman sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagai tolak ukur dan standar pengendalian pelaksanaan dana desa. Pengendalian intern menjaga proses operasi pemerintahan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Rencana organisasi dan metode untuk menjaga dan melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya merupakan isi dari dilakukannya pengendalian intern (Martini., et al, 2019). Secara langsung, tingkat transparansi dan akuntabilitas akan dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan serta pengetahuan sumber daya manusia di pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Hal ini lah yang akan menyebabkan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Beberapa upaya untuk mencegah kecurangan penyalahgunaan keuangan desa ini adalah dengan meningkatkan serta membangun sistem pengendalian internal yang baik dan menyeluruh pada setiap lingkungan pemerintahan (Ramon, 2014). Pengendalian intern menjadi sangat penting karena sistem akuntansi sebagai sistem informasi rentan terhadap kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk menyakinkan para pemangku kepentingan dan masyarakat tentang kebenaran dibuat oleh pemerintah desa maka diperlukannya sistem pengendalian intern yang optimal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati & Handayani (2021) mengemukakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ayem & Kusumasari (2020), namun hasil penelitian berbeda dilakukan Tiarno & Budiwitjaksono (2023) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Aksesibilitas laporan keuangan juga memberi pengaruh. Masyarakat yang mempunyai akses terhadap laporan pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan memungkinkan mereka membaca dan memahami laporan keuangan. Pemerintah harus dapat memberikan akses kemudahan kepada pengguna laporan keuangannya, tidak hanya bagi lembaga legislatif dan

regulator, namun juga kepada masyarakat yang mempercayakan pengelolaan dana publik kepada pemerintah (Kurniawan & Rahayu, 2019). Hasil penelitian Kurniawan & Rahayu (2019) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; sekalipun studi Puspa & Prasetyo (2020) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berbagai penelitian awal menunjukkan adanya inkonsistensi. Beberapa keterbatasan penelitian terdahulu yaitu menurut Ambarwati & Handayani (2021) memberikan saran untuk menambah objek penelitian tidak hanya satu desa saja tetapi ditambah dengan desa yang lain. Artini & Putra (2020) memberi saran agar memperluas populasi dan sampel serta mengubah objek penelitian. Berdasarkan kesimpulan dari keterbatasan dan saran dari peneliti terdahulu, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi keterbatasan tersebut, dengan menggunakan populasi 13 pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Muara Badak dan penelitian ini tidak hanya memperoleh data dari perangkat desa semata namun juga melibatkan pihak pengawas pengelolaan dana desa untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif dari sudut pandang pengelola dan pengawas. Maka berdasarkan uraian tersebut, dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis dan menguji sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

KAJIAN LITERATUR

Teori *Stewardship*

Menurut Donaldson and Davis (1991) teori *stewardship* berasumsi bahwa manajemen dalam suatu organisasi memiliki tanggung jawab terhadap pemiliknya. Teori ini juga memandang bahwa manajemen tidak termotivasi oleh keinginan pribadi tetapi fokus pada kepentingan organisasi. Menurut teori ini, kepuasan dan kesuksesan organisasi memiliki keterkaitan yang kuat. Teori *stewardship* dapat diterapkan untuk memberikan penjelasan mengenai eksistensi pemerintah desa (*steward*) sebagai suatu organisasi yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat semata mata untuk kesejahteraan masyarakat (*principal*). Pada Penelitian akuntansi sektor publik, teori *stewardship* dapat diterapkan karena pada dasarnya manusia adalah subjek utama yang berperan sebagai pendorong ekonomi. Akuntansi organisasi sektor publik sudah dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi yang menjadi perantara antara *steward* dengan *principals* (Antika et al., 2020). Penerapan Teori *stewardship* digunakan karena masyarakat (*principal*) memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa (*steward*) jika mereka bertindak sesuai dengan kepentingan publik umumnya. Dalam konteks akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, teori *stewardship* diterapkan dengan melihat bagaimana para pengelola keuangan desa bertindak sebagai penjaga dana desa. Mereka diharapkan dapat mengelola dana desa dengan asas transparansi, akuntabilitas, dan fokus pada kesejahteraan masyarakat desa, bukan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Teori *stewardship* ini juga digunakan pada penelitian serupa yang dilakukan Antika et al., (2020), Tiarno & Budiwitjaksono (2023), Puspa & Prasetyo (2020), dan Arfiansyah (2020).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP yang digunakan dalam pemerintahan diadopsi dari pengendalian internal oleh *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commisions* (COSO) (2013). Pengendalian internal menurut COSO adalah proses yang dirancang dan dipengaruhi oleh seluruh elemen dalam suatu organisasi yang meliputi dewan direktur, manajemen, dan karyawan. Senada dengan yang dikemukakan oleh (Mulyadi, 2016), bahwa sistem pengendalian internal merupakan serangkaian aturan dan prosedur yang dirancang untuk menjaga keamanan aset organisasi, memastikan data akuntansi akurat, meningkatkan efisiensi kerja, dan memastikan semua pihak mengikuti aturan organisasi. Dalam rangka perwujudan pemerintahan yang akuntabel, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan sejalan dengan kepentingan masyarakat. Selama proses tersebut, menuntut adanya aktivitas pengendalian yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk laporan evaluasi, mengkomunikasikan peristiwa yang relevan, andal, dan tepat waktu (Angraini et al., 2016).

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah RI No 60, 2008), unsur-unsur SPI diterapkan secara bersama-sama dan menjadi bagian yang integral penting dari kegiatan yang berlangsung di instansi Pemerintah. Unsur-unsur SPI yang sudah diterapkan dilingkungan pemerintahan di berbagai Negara meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah berkewajiban untuk membangun dan memelihara lingkungan kerja yang menciptakan perilaku positif dan kondusif sudah ditamsehingga mendorong penerapan sistem pengendalian intern yang efektif di lingkungan kerja.

2. Penilaian Risiko

Proses penilaian risiko mencakup identifikasi risiko dan analisis risiko yang relevan untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. Hasil dari proses ini akan menjadi acuan dalam merumuskan strategi pengelolaan risiko. Adapun tujuan instansi pemerintah yaitu memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.

3. Kegiatan Pengendalian

Setiap organisasi memiliki sistem pengendalian yang berbeda-beda, tergantung pada tujuan dan kegiatannya. Secara umum, aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit dapat diklasifikasikan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi Informasi dan komunikasi mengacu pada identifikasi, mencatat, dan, pertukaran informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi harus dilaksanakan secara efektif.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan adalah proses menentukan kualitas kinerja pengendalian intern dari waktu ke waktu. Proses pemantauan dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan monitoring, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut hasil audit dan review lainnya. Proses ini dilakukan secara terus menerus.

Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas laporan keuangan bermakna adanya kemudahan untuk mengakses laporan keuangan pemerintah bagi para pengguna laporan keuangan. Kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi keuangan merupakan elemen penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Untuk mencapai prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah hendaknya membuka akses terhadap laporan keuangan tidak terbatas pada lembaga legislatif/DPRD, tetapi juga ditujukan kepada masyarakat luas (Fauziyah & Handayani, 2017). Laporan keuangan yang ditampilkan dengan baik, tetapi tidak memberikan kemudahan untuk diakses, maka upaya untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan tidak akan optimal. Pemerintah perlu menyediakan akses yang lebih luas terhadap laporan keuangannya. Tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawas saja, namun juga pada masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengelola keuangan masyarakat (Priscilla et al., 2022).

Instansi pemerintah harus memenuhi beberapa indikator agar dianggap handal dan terpercaya dalam melaporkan kinerjanya melalui publikasi laporan keuangan. Menurut (Fauziyah & Handayani, 2017) indikator dari aksesibilitas laporan keuangan sebagai berikut:

1. Keterbukaan

Laporan keuangan instansi pemerintah dipublikasikan dan disampaikan secara terbuka melalui media cetak dan media massa, sehingga pengguna informasi laporan keuangan dapat dilihat oleh publik secara langsung.

2. Kemudahan

Instansi pemerintah harus memastikan bahwa para pemangku kepentingan (*stakeholder*) diberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi mengenai keuangan daerah.

3. *Accesible* (mudah diakses)

Instansi pemerintah harus memastikan masyarakat dapat mengakses informasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet atau daring.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk menjelaskan dan menjawab segala hal yang berkaitan dengan langkah-langkah dari seluruh proses dan keputusan yang dilakukan juga bertanggung jawab atas hasil kerjanya (Lukito, 2014). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas pengelolaan keuangan desa yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, kebijakan, dan peraturan yang berlaku (Supadmi & Saputra, 2018). Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa oleh kepala desa sebagai pelaksana untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui akuntabilitas, kualitas kinerja pemerintah desa diharapkan dapat mengalami peningkatan sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat (Arfiansyah, 2020). Pada prinsipnya, akuntabilitas melibatkan penyediaan informasi dan pengungkapan mengenai aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada para pihak yang memiliki kepentingan terkait (Setiawan et al., 2017). Akuntabilitas dianggap sebagai unsur krusial untuk mencapai *good governance* atau tata kelola pemerintah yang baik (Huque, 2011).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan teori *stewardship*, pemerintah desa diharapkan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat. Untuk meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat, pemerintah desa perlu menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai. Sistem pengendalian intern merupakan sebuah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pengendalian internal diterapkan di lingkungan pemerintahan desa untuk menjaga proses operasional kegiatan, sehingga dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Hasanah et al., 2020). Pengendalian intern bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Tanpa terjadinya penyelewengan dan penyimpangan terhadap tujuan yang ingin dicapai, sehingga pengendalian intern memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Antika et al., 2020). Penelitian Martini et al (2019), Puspa & Prasetyo (2020), Arfiansyah (2020), Ambarwati & Handayani (2021), Husain et al (2023), Iyona et al (2023) dan Antamevia (2024) menemukan bahwa SPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. SPIP yang memadai akan mendorong pemerintah desa untuk mengambil kebijakan dan keputusan yang selaras dengan kepentingan masyarakat sehingga setiap aktivitas pengelolaan keuangan desa akan memenuhi prinsip akuntabilitas.

H₁ : SPIP berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Teori *stewardship* menekankan tanggung jawab pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa dengan efektif demi kepentingan masyarakat. Pentingnya penerapan prinsip pengelolaan keuangan yang efektif dan ketersediaan informasi yang mudah diakses bagi masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam menentukan tingkat akuntabilitas keuangan daerah. Kurangnya kemampuan laporan keuangan dalam mencapai tingkat akuntabilitas tidak hanya disebabkan oleh tidak tercapainya semua informasi yang relevan bagi pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak tersedia secara langsung digunakan oleh masyarakat. Akibatnya terjadi penyajian laporan keuangan yang tidak komprehensif dan tidak lengkap yang dapat mengurangi kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan (Masyhur, 2017). Hasil penelitian Kurniawan & Rahayu (2019), Meilani & Sukamanto (2022), Sinamo et al (2022), Sya'diah et al (2022), Latif & Mahmud (2022), dan Masdar et al (2022) mendapati aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Kemudahan akses atas informasi laporan keuangan kepada masyarakat menunjukkan terciptanya sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi atas pertanggungjawaban penggunaan dana mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya.

H₂ : Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersumber dari data primer. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket). Penyebaran kuesioner dilakukan secara tatap muka dan melalui *googleform (online)*. Pengukuran variabel menggunakan skala likert dengan poin 1-5 yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), netral (N), setuju (S), sangat setuju (SS). Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di 13 desa yang ada di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* atau penentuan sampel dengan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perangkat desa yang melaksanakan fungsi akuntansi/keuangan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan kaur perencanaan dengan minimal masa kerja 1 tahun.
2. BPD, terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris dengan minimal masa kerja 1 tahun.

Tabel 2.

Jumlah Sampel Penelitian

No.	Nama Desa	Jumlah
1.	Saliki	7
2.	Salo Palai	7
3.	Muara Badak Ulu	7
4.	Muara Badak Ilir	7
5.	Tanjung Limau	7
6.	Tanah Datar	7
7.	Badak Baru	7
8.	Suka Damai	7
9.	Badak Mekar	7
10.	Desa Gas Alam	7
11.	Batu-Batu	7
12.	Salo Cella	7
13.	Sungai Bawang	7
Jumlah		91

Sumber: data primer yang diolah (2024)

Operasional Variabel

Adapun definisi operasional dalam penelitian ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi Variabel	Indikator	Sumber
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum	a. Kepatuhan pada hukum dan peraturan	Mahmudi, 2015
		b. Audit kepatuhan	
		c. Kesesuaian anggaran dengan visi dan misi	
	2. Akuntabilitas Proses	d. Alokasi anggaran sesuai prosedur	
		e. Prinsip efisiensi, efektivitas dan benefit anggaran	
	3. Akuntabilitas Program dan Kebijakan	f. Pertanggungjawaban anggaran	
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X ₁)	a. Lingkungan Pengendalian	a. Aturan berperilaku	Peraturan Pemerintah RI No 60, 2008
	b. Penilaian Risiko	b. Kepemimpinan yang kondusif dan aktif	
	c. Kegiatan Pemantauan	c. Identifikasi,antisipasi dan analisis risiko	

Tabel 3.
Definisi Operasional Variabel (lanjutan)

Variabel	Dimensi Variabel	Indikator	Sumber
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X ₂)	d. Informasi dan Komunikasi	d. Identifikasi, pelaksanaan dan evaluasi aktivitas pengendalian	Fauziyah & Handayani, 2017
	e. Pemantauan	e. Ketersediaan saluran informasi dan komunikasi	
	f. Pengendalian Intern	f. Tindak lanjut hasil temuan	
	a. Keterbukaan	a. Publikasi laporan keuangan kepada pengguna	
	b. Kemudahan	b. Publikasi melalui media masa	
	c. <i>Accesible</i>	c. Kemudahan memperoleh informasi	
		d. Distribusi informasi kepada pengguna	
		e. Akses informasi melalui internet dan media lain	

Sumber: data yang diolah (2024)

Analisis Deskriptif Responden

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 91 orang responden. Dari total kuesioner yang didistribusikan sebanyak 91 kuesioner, terdapat 2 kuesioner yang tidak memenuhi kriteria, yang dalam hal ini tidak memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun, sehingga tidak dapat diolah lebih lanjut untuk dianalisis. Total kuesioner yang dapat digunakan dala diolah dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 89 kuesioner. Responden dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur perencanaan, ketua BPD, wakil ketua BPD, dan sekretaris BPD di 13 desa yang di Kecamatan Muara Badak. Berikut penyajian data statistik responden:

Tabel 4.
Data Statistik Responden

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin			
1.	Laki-laki	53	59,6%
	Perempuan	36	40,4%
	Jumlah	89	100%
Umur			
2.	20-30	3	3,4%
	31-40	34	38,2%
	41-50	38	42,7%
	51-60	14	15,7%
	Jumlah	89	100%
Tingkat Pendidikan			
3.	SLTA/SMA/SMK	53	59,6%
	D3	10	11,2%
	D4/S1	26	29,2%
	Jumlah	89	100%
Masa Kerja			
4.	≥1-2 Tahun	5	5,6%
	>2 Tahun	84	94,4%
	Jumlah	89	100%

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan *Structural Equation Model - Partial Least Square* (SEM-PLS) dengan bantuan program Smt-PLS ver 4.0. Adapun tahap-tahap sebagai berikut:

1. Uji model pengukuran (*outer model*) merupakan uji yang dilakukan untuk memastikan bahwa ukuran (*measurement*) yang digunakan dalam penelitian sesuai sebagai pengukur atau valid dan reliabel. Untuk uji validitas menggunakan nilai *convergent validity* dan *discriminant validity composite* sedangkan uji reliabel menggunakan nilai *composite reliability* dan *Cronbach's Alpha*.
2. Uji model struktural (*inner model*) uji yang bertujuan untuk memprediksi hubungan kausalitas antara variabel laten. *Inner model* juga menggambarkan adanya keterkaitan di antara variabel laten yang dibangun sesuai teori substantif (*substantive ltheory*). Pengukuran model struktural menganalisis nilai *R square* (R^2), *Estimate for path coeficient* (*Estimasi Koefisien Jalur*), *Predictive Relevance* (Q^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran Outer Model

Uji validitas

Convergent Validity

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan nilai AVE (*Average Varians Extracted*). Dengan syarat apabila nilai AVE > 0,50 dan menggunakan nilai *outer loading* syarat apabila nilai *outer loading* > 0,70 maka model dianggap baik dan valid untuk masing masing konstruk. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.

Convergent Validity

Kode Item	Nilai Outer Loading	Nilai Standar Outer Loading	keterangan	Nilai AVE
X _{1.01}	0.720	0.70	Valid	0.570
X _{1.02}	0.755	0.70	Valid	
X _{1.03}	0.747	0.70	Valid	
X _{1.04}	0.775	0.70	Valid	
X _{1.05}	0.738	0.70	Valid	
X _{1.06}	0.740	0.70	Valid	
X _{1.07}	0.770	0.70	Valid	
X _{1.08}	0.806	0.70	Valid	
X _{1.09}	0.750	0.70	Valid	
X _{1.10}	0.780	0.70	Valid	
X _{1.11}	0.743	0.70	Valid	
X _{1.12}	0.754	0.70	Valid	
X _{1.13}	0.795	0.70	Valid	
X _{1.14}	0.733	0.70	Valid	
X _{1.15}	0.724	0.70	Valid	
X _{1.16}	0.713	0.70	Valid	
X _{1.17}	0.743	0.70	Valid	
X _{1.18}	0.749	0.70	Valid	
X _{1.19}	0.805	0.70	Valid	
X _{1.20}	0.745	0.70	Valid	

Tabel 5.

Convergent Validity (lanjutan)

Kode Item	Nilai Outer Loading	Nilai Standar Outer Loading	keterangan	Nilai AVE
X ₂ .01	0.753	0.70	Valid	0.575
X ₂ .02	0.732	0.70	Valid	
X ₂ .03	0.799	0.70	Valid	
X ₂ .04	0.808	0.70	Valid	
X ₂ .05	0.715	0.70	Valid	
X ₂ .06	0.738	0.70	Valid	
Y.01	10.783	0.70	Valid	0.607
Y.02	10.795	0.70	Valid	
Y.03	10.779	0.70	Valid	
Y.04	10.765	0.70	Valid	
Y.05	10.791	0.70	Valid	
Y.06	10.779	0.70	Valid	
Y.07	10.750	0.70	Valid	
Y.08	10.767	0.70	Valid	
Y.09	10.803	0.70	Valid	

Sumber: Data diolah, 2024

Discriminant Validity

Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *cross loading* antara indikator dengan konstruk. Jika nilai *cross loading* pada suatu konstruk lebih tinggi dibandingkan nilai *cross loading* pada konstruk lainnya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok lainnya. Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai *cross loading* masing-masing indikator konstruk lebih tinggi daripada konstruk variabel lainnya. Dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur variabelnya masing masing lebih baik daripada variabel lainnya.

Tabel 6.

Cross Loading

Kode Item	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X ₁)	Aksesibilitas Laporan Keuangan (X ₂)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)
X ₁ .01	0.720	0.157	0.425
X ₁ .02	0.755	0.243	0.482
X ₁ .03	0.747	0.323	0.454
IX ₁ .04	0.775	0.336	0.585
IX ₁ .05	0.738	0.413	0.503
IX ₁ .06	0.740	0.366	0.453
IX ₁ .07	0.770	0.392	0.465
IX ₁ .08	0.806	0.360	0.621
IX ₁ .09	0.750	0.380	0.511
IX ₁ .10	0.780	0.305	0.577
IX ₁ .11	0.743	0.338	0.437
IX ₁ .12	0.754	0.280	0.456
IX ₁ .13	0.795	0.240	0.584
IX ₁ .14	0.733	0.212	0.366
IX ₁ .15	0.724	0.365	0.355
IX ₁ .16	0.713	0.179	0.352
IX ₁ .17	0.743	0.235	0.390
IX ₁ .18	0.749	0.255	0.404
X ₁ .19	0.805	0.376	0.589
X ₁ .20	0.745	0.397	0.508

Tabel 6.**Cross Loading** (lanjutan)

Kode Item	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X ₁)	Aksesibilitas Laporan Keuangan (X ₂)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)
X ₂ .01	0.309	0.753	0.235
X ₂ .02	0.305	0.732	0.283
X ₂ .03	0.426	0.799	0.347
X ₂ .04	0.359	0.808	0.347
X ₂ .05	0.170	0.715	0.097
X ₂ .06	0.203	0.738	0.297
Y.01	0.413	0.453	0.783
Y.02	0.462	0.471	0.795
Y.03	0.524	0.303	0.779
Y.04	0.503	0.248	0.765
Y.05	0.490	0.295	0.791
Y.06	0.570	0.298	0.779
Y.07	0.480	0.243	0.750
Y.08	0.505	0.143	0.767
Y.09	0.562	0.253	0.803

Sumber: Data diolah, 2024

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas suatu konstruk dapat dilihat dari nilai *cronbach alpha* dan *composite reliability*. Nilai *lcronbach's alpha* dan *composite realibility* > 0,70 untuk masing masing konstruknya. Dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7.**Construct Reliability and Validity**

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Keterangan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X ₁)	0.960	0.964	0.964	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X ₂)	0.856	0.866	0.890	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y ₁)	0.919	0.921	0.933	Reliabel

Sumber: Data Diolah, 2024

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* dan *composite reliability* masing masing konstruk > 0,70 sehingga dapat disimpulkan semua indikator konstruk telah reliabel.

Pengukuran Inner Model

R-square (R^2)

R-square pada konstruk (variabel dependen) memberikan informasi tentang seberapa baik model dalam penelitian menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Interpretasi nilai R^2 terdiri dari 3 klasifikasi yaitu nilai R^2 sebesar 0,67 dianggap baik, nilai R^2 sebesar 0,33 dianggap moderat, dan jika R^2 sebesar 0,19 maka dianggap lemah. Dapat dilihat pada Tabel 8. Berdasarkan pada Tabel 8, nilai R^2 pada variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0.434. Hal ini menjelaskan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) dapat dijelaskan sebesar 43,4% variabel SPIP dan aksesibilitas laporan keuangan (X); sisanya 56,6% dijelaskan oleh variabel independen di luar model penelitian ini.

Tabel 8.

Nilai *R-square* (R^2)

Variabel Dependen	<i>R-square</i>	<i>Adjusted R-square</i>
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	0.434	0.421

Sumber: Data diolah, 2024

Predictive Relevance (Q^2)

Dilakukan perhitungan *Goodness of Fit* guna untuk mengevaluasi model penelitian secara keseluruhan dengan menggunakan nilai relevansi prediksi (Q^2). Apabila nilai $Q^2 > 0$, maka menunjukkan bahwa model memiliki nilai *predictive relevance* yang baik. Berdasarkan nilai R^2 yang tercantum pada tabel 6 yaitu R^2 sebesar 0,434. Adapun rumus GOF yang digunakan sebagai berikut:

$$Q^2 = 1 - (1 - R^2)$$

Maka hasil perhitungan nilai Q^2 sebagai berikut:

$$Q^2 = 1 - (1 - R^2)$$

$$Q^2 = 1 - (1 - 0,188)$$

$$Q^2 = 1 - (0,812)$$

$$Q^2 = 0,188$$

Hasil perhitungan diatas menunjukkan nilai $Q^2 > 0$ berarti memiliki nilai *predictive relevance* yang baik. Nilai *predictive relevance* sebesar 0,188 atau nilai relevansi prediksi adalah sebesar 18,8%.

Uji Hipotesis

Pegujian hipotesis menggunakan nilai statistik, apabila nilai t-statistik $>$ t-tabel (1,96) dan nilai signifikansi $p\text{ value} \leq 0,05$, yang berarti bahwa hipotesis terdukung dan signifikan. Adapun hasil dari perhitungan *path coefficient* ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9.
Path Coefficient

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P values
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_1) > - Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0.587	0.593	0.084	6.946	0.000
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2) > Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0,143	0.165	0.089	1.611	0.107

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil output SmartPLS Ver 4.0 pada Tabel 9 dapat disimpulkan bahwa:

- Besarnya koefisien parameter untuk variabel SPIP (X_1) terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) sebesar 0.587 dengan t-statistik 6,946 > 1,96 dan nilai *p-value* 0,000 < 0,05, hal ini telah memenuhi syarat. Sehingga dapat dinyatakan bahwa H_1 diterima, SPIP berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- Besarnya koefisien parameter untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan (X_2) terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) sebesar 0.143 dengan t-statistik 1,611 < 1,96 dan nilai *p-value* 0,107 > 0,05, hal ini tidak memenuhi syarat. Dapat dinyatakan bahwa H_2 tidak terdukung, aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh SPIP terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-statistik 6,946 > 1,96 dan nilai *p-value* 0,000 ≤ 0,05, artinya SPIP mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa dengan menerapkan SPIP akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap tiap proses penyelenggaraan pemerintah desa sehingga memenuhi kriteria akuntabilitas dengan baik. Akuntabilitas dapat tercipta apabila setiap instansi pemerintah menerapkan pengendalian internal yang tepat, karena suatu instansi pemerintah wajib menyajikan serta menyampaikan laporan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan. Praktik SPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. SPIP sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Pengendalian internal yang baik akan membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa, meningkatkan transparansi, dan mendukung akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut mendukung *teori stewardship*, yang mengatakan bahwa pemerintah sebagai *steward* berusaha memberikan tanggung jawab yang baik kepada masyarakat (*principal*) untuk mengelola sumber daya daerah dengan baik. Hasil dari penerapan pengendalian internal yang efektif dapat menunjukkan bahwa

pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Martini, et al. (2019), Puspa & Prasetyo (2020), Arfiansyah (2020), Ambarwati & Handayani (2021), Husain, et al. (2023), Iyona, et al. (2023) dan Antamevia (2024) mengenai variabel SPIP berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-statistik $1,611 < 1,96$ dan nilai p-value $0.107 > 0,05$. Teori *stewardship* menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan; *steward* yang bertanggung jawab akan memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara jujur dan transparan. Aksesibilitas laporan keuangan memungkinkan semua pemangku kepentingan memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi, yang sesuai dengan prinsip *stewardship* yang menekankan akuntabilitas kepada publik. Praktik aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merujuk pada sejauh mana masyarakat dan pihak terkait dengan mudah mengakses dan memahami laporan keuangan. Transparan dan kemudahan mengakses akan memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa. Sayangnya penelitian tidak berhasil membuktikan aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan karena laporan pengelolaan keuangan desa saat ini hanya dapat diakses melalui media sederhana seperti baliho dan papan pengumuman, sehingga tidak cukup untuk memberikan gambaran lengkap dan transparan tentang pengelolaan keuangan desa. Akibatnya, media akses yang terbatas ini tidak mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat kesulitan untuk menilai dan mengawasi penggunaan keuangan desa secara efektif. Untuk mencapai akuntabilitas yang lebih baik, diperlukan strategi komunikasi yang lebih modern dan komprehensif. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Puspa & Prasetyo (2020) dan Widhastama & Jaeni (2024) mengenai variabel Aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, namun tidak sejalan dengan temuan Kurniawan & Rahayu (2019), Meilani & Sukamanto (2022), Sinamo et al (2022), Sya'diah et al (2022), Latif & Mahmud (2022), dan Masdar et al (2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa SPIP berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah. Artinya, dengan menerapkan SPIP yang baik Pemerintah Desa dapat memenuhi kriteria akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, terutama pada unsur lingkungan pengendalian seperti menerapkan peraturan, nilai-nilai etika, struktur organisasi dan kepemimpinan. Terkait aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa hal ini disebabkan laporan keuangan desa hanya dapat diakses melalui baliho dan papan pengumuman sehingga kurang optimal dan tidak dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, karena sampelnya pada desa yang berada di Kecamatan Muara Badak. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel penelitian sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Penelitian ini juga terbatas dalam pengukuran variabel aksesibilitas dalam konteks laporan pertanggungjawaban saja. Penelitian selanjutnya diarahkan untuk memperluas kajian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa bukan hanya dari segi pelaporan dan pertanggungjawaban saja tetapi pada proses perencanaan dan pelaksanaannya.

Penelitian ini berimplikasi secara teoritis dan praktis. Implikasi teoritis penelitian ini terletak pada pentingnya sistem pengendalian intern pemerintah bagi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Konsep SPIP lebih dikenal dalam konteks pemerintah daerah, namun hasil penelitian ini menemukan bahwa SPIP juga penting dalam lingkungan pemerintah daerah yang lebih kecil yaitu pemerintah desa. Implikasi teoritis penelitian ini memberikan wawasan bagi pengelola keuangan desa untuk terus mempertimbangkan dan memperhatikan pentingnya sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) untuk meningkatkan nilai-nilai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, L., & Handayani, U. N. V. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Kelurahan Margokaton Kabupaten Sleman Yogyakarta). In Seminar Nasional dan Call For Paper 2021: Pasca Pandemi Covid-19. STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta, 129-147.
- Antamevia, S. M. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Wilayah Kecamatan Batujajar. *Jurnal Praxis Idealis : Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jp.v1i1.2642>.
- Antika, Z., Yunika M., & Hafifah N. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 15(2), 212–232. <https://doi.org/10.21009/wahana.15.027>
- Arfiansyah, M. . (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3, 67–82. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.5963>.
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohan, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 473-485.
- Artini, N. L. W., & Putra, I. P. D. S. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 188–218. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i2.978>.
- Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Accountability Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(2), 160. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25827>
- Beritaalternatif. (2023). *Kejari Kukar Ungkap Sejumlah Kasus Korupsi*. Wwww.Beritaalternatif.Com. <https://beritaalternatif.com/kejari-kukar-ungkap-sejumlah-kasus-korupsi/>
- D. Angraini, R. Agusti, L. A. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *JOM Fekon*, 3, 1178–1189.
- Donaldson, L. and Davis, J. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory. *Australian Journal of Management*, 49–64.

- Husain, S. P., Seber, I. S., & Monoarfa, V. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 66-76. <https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.64>
- Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 17–27. <https://doi.org/10.18196/rab.040149>.
- Huque, A. S. (2011). Accountability and Governance: Strengthening Extra-Bureaucratic Mechanism in Bangladesh. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 60(1), 59-74.
- Iyona, F., Mahdalena., Badu, R. S. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 238-252.
- Klikkaltim. (2023). Pj Kepala Desa di Kukar Korupsi Rp1 Miliar Lebih, Palsukan Dokumen hingga Stempel. <https://klikkaltim.com/category/kutai-kartanegara/pj-kepala-desadi-kukar-korupsi-rp-1-miliar-lebih-palsukan-dokumen-hingga-stempel>.
- Kurniawan, D., & Rahayu, S. (2019). The Effect Of The Presentation Of Financial Statment And Accessibility Financial Statment On Regional Financial Management Accountability (Case Study in Mataram City Regional Secre). *Management*, 6(1), 705–714. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/8743>
- Latif, A., & Mahmud, A. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan Transparansi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pati). *Business and Accounting Education Journal*, 3(2), 287-301. <https://doi.org/10.15294/baej.v3i2.62451>
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik: tantangan berdemokrasi ke depan*.
- M. R. Fauziyah; N. Handayani. (2017). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6, 119–130. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i2.5248>.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP. YKPN.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkufli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106-123.
- Masdar, M., Mas'ut, M., Lubis, F. K. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 62-70.
- Masyhur, M. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah Kota Dumai. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1179–1192.
- Meilani, N, & Sukarmanto, E. (2022). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Dana Desa. *Bandung Conference Series: Accountancy*, Vol. 2, No. 1.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah RI. (2008). *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemrintah*. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>.
- Peraturan Pemerintah RI. (2014a). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 2, 1–25.
- Peraturan Pemerintah RI. (2014b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. [https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37\(3\).8933](https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37(3).8933).
- Priscilla, D., Taufik, T., & Riau, U. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penerapan Pengendalian Internal dan Penerapan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Seluruh OPD di Kabupaten Siak). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2), 180–190. <https://doi.org/10.35145/bilancia.v6i2.1317>.

- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>.
- Ramon, D. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Se Provinsi Sumatera Barat. In *Jurnal Akuntansi* (Vol. 2, Issue 2, pp. 1–19).
- Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 1–16
- Sinamo, E. F., Yusra, M., Hilmi, H., & Nazaina, N. (2022). Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Kompetensi Aparatur Desa, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 1(2), 237-252.
- Supadmi, N., & Suputra, D. D. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 13(2), 132–145. <http://www.jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/383/332>.
- Sya'diah, H., Sissah., & Hafiz, A. P. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 130–138. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v2i3.171>.
- Tiarno, S. M., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penggunaan Siskeudes Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 7(2), 1596–1608.
- Whidastama, V. A. K., & Jaeni. (2024). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kabupaten Demak). *Edunomika*, 8(2), 1-15.